

## **Analisis Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam Meningkatkan Partisipasi Politik bagi Peserta Didik**

**Alfian Zenuis Dakhi**

*Universitas Kristen Indonesia, Jakarta*

**Corresponding Author:**  zeniaszenias00@gmail.com

### **ABSTRACT**

The article discusses the role of civics education teachers in increasing students' political participation. Citizenship education is education that equips students with a lot of knowledge, attitudes and skills so that they can live as citizens who are politically aware and able to participate in politics. Citizenship Education, as part of subjects that aim to make citizens of a good, democratic, character and realize democratic ideals in building the Indonesian nation, and become one of the appropriate tools used to encourage students to participate in political life. Therefore, the role of the Citizenship Education Teacher is very important in increasing the political participation of students. Political participation is the activity of a person or group of people actively participating in political life, among others by electing government leaders and directly or indirectly influencing government policy. These activities include activities such as voting in general elections, attending general meetings, interacting with government officials or members of parliament, joining political parties. The method used in the preparation of this article is a qualitative method and the technique used is literature study

### **ARTICLE INFO**

*Article history:*

Received

March 29, 2023

Revised

May 16, 2023

Accepted

May 20, 2023

**Keywords:** *Role Citizenship Education Teachers, Increasing Political Participation, Teacher Participation*

Journal Homepage

<https://www.attractivejournal.com/index.php/aj/>

This is an open-access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Published by

CV. Creative Tugu Pena

### **PENDAHULUAN**

Pendidikan sangat penting untuk menjadikan bangsa Indonesia bermoral, beretika, dan menjadi warga negara yang baik. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Presiden Republik Indonesia, 2003) menjelaskan bahwa: Pendidikan bertujuan agar peserta didik memiliki kemampuan mengatur diri sendiri, berkepribadian, cerdas, berakhlak mulia, dan berkepribadian berkualitas. Kekuatan spiritual keagamaan sangat diperlukan bagi diri, masyarakat, bangsa dan negara. (Khamisa, 2018). Artinya pendidikan ditujukan untuk mendewasakan peserta didik agar dapat tumbuh dan berkembang secara benar sehingga dapat mengembangkan bakat, potensi dan keterampilannya. Pelajar merupakan generasi muda yang berperan besar dalam mempertahankan kepemimpinan di masa depan. Baik buruknya suatu bangsa tergantung pada kualitas generasi mudanya. Generasi muda yang berusaha berbekal ilmu sejak dini akan memberikan pengaruh yang baik bagi kemajuan bangsa (Rahman, 2019).

Pelajar sebagai generasi muda harus memiliki sikap yang dapat mencerminkan warga negara yang baik sehingga nantinya dapat menjadi pemimpin yang penuh tanggung jawab. Pendidikan kewarganegaraan sebagai bagian dari mata pelajaran yang bertujuan untuk menjadikan warga negara yang baik, demokratis, berkarakter dan mewujudkan cita-cita demokrasi dalam membangun bangsa Indonesia, sebenarnya merupakan alat yang tepat digunakan untuk mendorong peserta didik untuk terlibat secara politik (Efendi, 2020). Pendidikan Kewarganegaraan sebagai sarana untuk melibatkan pelajar dalam kehidupan politik. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan modal utama bagi peserta didik itu sendiri, agar kelak dapat menjadi warga negara yang baik dan mampu berperan aktif dalam segala bentuk partisipasi politik.

Pendidikan Kewarganegaraan dalam mengembangkan pemahaman peserta didik tentang partisipasi politik dapat dilihat pada pencapaian peserta didik pada bidang kompetensi kewarganegaraan, yaitu pengetahuan kewarganegaraan (civic knowledge), sikap kewarganegaraan (civic attitude) dan keterampilan kewarganegaraan (civic skills) di tingkat tinggi partisipasi politik yang berkualitas dan bertanggung jawab. (Efendi, 2011. 2020). Hal ini dimaksudkan agar pelajar dapat berpartisipasi dalam pemilihan pemimpin yang berkualitas dan bertanggung jawab terhadap perilaku kehidupan politik di lingkungannya. Salah satu peran yang sangat penting ialah bagaimana Guru dalam hal ini mampu memberikan pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang menyenangkan kepada peserta didik sehingga setiap materi dalam Pendidikan Kewarganegaraan khususnya dalam hal partisipasi politik dapat ditangkap baik oleh peserta didik.

Pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang penting untuk memberikan pemahaman kepada pelajar tentang politik. Dengan demikian, pelajar diharapkan dapat terlibat aktif dalam segala aktivitas politik yang ada. Pendidikan kewarganegaraan dirancang untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air (Rahman, 2020). Kita membutuhkan kebanggaan terhadap bangsa dan negara kita, rasa cinta terhadap Tanah Air. Hal ini bertujuan agar pelajar mampu menjadi agen perubahan dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam pendidikan kewarganegaraan, partisipasi politik pelajar berguna dalam memberikan pengetahuan politik dan pemahaman politik. Saat mempelajari IPS, pelajar diberikan materi tentang suprastruktur dan infrastruktur sistem politik Indonesia, lembaga negara Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945, partisipasi warga negara dalam sistem politik Republik Indonesia, dan bahan lainnya (Haerul, 2019). Berbagai materi tersebut berguna bagi pelajar untuk menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan, sikap dan keterampilan sehingga dapat hidup sebagai warga negara yang sadar politik dan mampu berpartisipasi dalam politik.

## **METODE**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu studi kepustakaan/studi literatur dengan mereview berbagai jurnal dan buku yang berkaitan dengan pendidikan kewarganegaraan dan pendidikan politik sebagai sumber referensi. Studi kepustakaan ini berfungsi untuk mengumpulkan informasi dari peneliti sebelumnya untuk dijadikan sebagai pedoman dalam penulisan. Menurut Nazir (2013, hal.93), penelitian kepustakaan adalah suatu metode pengumpulan data dengan melakukan studi telaah terhadap buku, literatur, catatan dan laporan yang relevan dengan masalah yang sedang dipecahkan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Relevansi pendidikan kewarganegaraan di sekolah**

Pendidikan kewarganegaraan di Indonesia adalah pendidikan yang menitikberatkan pada peran warga negara dalam kehidupan bernegara. Dimana bertujuan untuk memajukan peran ini berdasarkan ketentuan Pancasila dan UUD 1945, untuk menjadi warga negara harapan bangsa dan kepada siapa negara dapat bersandar (Vijaya, 2020). Pendidikan kewarganegaraan dapat menjadi sarana mempersiapkan generasi muda untuk memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara Indonesia, sehingga dapat membentuk manusia yang selalu dapat berpikir kritis, yang nantinya dapat menjadi kebanggaan negara.

Pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan politik dapat membentuk pandangan demokrasi pelajar di sekolah. Melalui mata pelajaran PKn, guru berupaya membentuk sikap pelajar dengan menanamkan nilai-nilai yang dapat membangkitkan kesadaran politik mereka (Bashori, 2018). Oleh karena itu, perlu disampaikan kepada pelajar pemahaman tentang pentingnya pendidikan kewarganegaraan, mengingat pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mengajarkan untuk memahami politik, tetapi juga tahu bagaimana menerapkannya dalam tindakan politik.

Pendidikan kewarganegaraan dari segi akademik memiliki arti yang jelas yaitu ilmu politik, artinya pendidikan kewarganegaraan tidak mudah dipengaruhi baik dari dalam maupun dari luar, yang dapat mencemari karakter bangsa Indonesia. Oleh karena itu, akar pengetahuan pedagogik yang jelas dan pembahasan materi yang jelas akan memperkuat karakter generasi bangsa, khususnya anak sekolah. Karena merekalah yang akan mengambil posisi kepemimpinan di masa depan untuk meningkatkan citra pemimpin saat ini, yang sebagian besar sangat merugikan bangsa Indonesia (Pahlevi, 2017). Pendidikan kewarganegaraan dapat membimbing peserta didik melalui roda kepemimpinan sehingga nantinya dapat menjadi pemimpin masa depan yang handal, berkualitas dan nasionalis.

Pendidikan kewarganegaraan berperan penting dalam mengoptimalkan bonus demografi. Tujuan pembelajaran melalui pendidikan kewarganegaraan adalah untuk meningkatkan kualitas pemahaman pelajar. Pendidikan kewarganegaraan menitikberatkan pada upaya menjadikan warga negara Indonesia menjadi pan-kasilis agar dapat mempraktikkan partisipasi dalam masyarakat (Nanggala, 2020). Dalam negara kebangsaan yang demokratis, pendidikan kewarganegaraan tidak hanya dimasukkan dalam kurikulum sekolah dan penting untuk pembelajaran, tetapi juga dipandang sangat penting dalam pembentukan warga negara. oleh sumber lain yang berasal dari ilmu pengetahuan, dampak positif dari sekolah, pendidikan, masyarakat, dan orang tua yang melatih pelajar untuk berpikiran terbuka, yang pada akhirnya dapat bertindak lebih demokratis (Berlian, 2021).

Sikap demokratis ini bertujuan agar pelajar dapat hidup rukun demi tercapainya kesejahteraan bersama, sehingga dapat tercipta lingkungan yang nyaman dan damai. Pendidikan kewarganegaraan merupakan salah satu bidang studi dalam konteks pendidikan, yang berperan penting dalam meningkatkan pemahaman kebangsaan, semangat nasionalisme dan pembentukan warga negara yang baik sesuai dengan ideologi bangsa dan konstitusi negara.

### **2. Partisipasi politik pelajar**

Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Partisipasi politik dilakukan oleh orang-orang dalam posisinya sebagai warga negara, bukan politisi atau pegawai negeri (Rahman, 2016). Dengan demikian, dalam hal ini partisipasi politik harus dilakukan oleh

rakyat secara sukarela tanpa ada pengaruh dari orang lain atau pihak yang ingin berkuasa.

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang yang berperan serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan memilih pemimpin pemerintahan dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah. Tindakan tersebut meliputi kegiatan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjalin hubungan dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, bergabung dengan partai politik (Wijaya, 2020). Partisipasi politik adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok, kegiatan partisipasi dapat dilakukan dengan berbagai cara dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu contoh kecil dari keterlibatan politik adalah menghadiri pertemuan seperti pertemuan mingguan organisasi sekolah seperti OSIS.

Pelajar sebagai generasi muda yang nantinya akan menjadi pewaris cita-cita bangsa berkewajiban untuk berperan aktif dalam pembangunan bangsa. Oleh karena itu, pelajar harus memiliki pengetahuan dan keterampilan politik agar kelak dapat menggunakan ilmunya untuk menyelenggarakan politik yang bertanggung jawab (Uniarto, 2020). Upaya peningkatan partisipasi pelajar dalam kehidupan politik dapat diperoleh melalui studi IPS yaitu dengan membekali pelajar dengan materi politik yang fungsinya menginformasikan kepada pelajar tentang pentingnya mengikuti berbagai kegiatan yang berkaitan dengan politik. Partisipasi politik dapat membantu pelajar memperoleh dan memahami informasi penting serta memberi mereka kesempatan dan dorongan untuk berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan sekolah (Rahman, 2016). Hal ini bertujuan agar peserta didik menjadi warga negara yang dapat berperan serta secara aktif dan bertanggung jawab dalam segala kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Partisipasi politik juga dapat dilakukan oleh pelajar di luar kelas melalui kegiatan ekstrakurikuler dan intrakurikuler, OSIS sebagai organisasi sekolah memastikan sosialisasi pentingnya partisipasi pelajar dalam pemilihan ketua. OSIS digunakan sebagai simulasi pemilu dimana pelajar akan diinformasikan tentang tata cara pemilu sejak dini (Rahman). Terpilihnya Ketua OSIS dapat membantu pelajar membentuk partisipasi politiknya sehingga pelajar tersebut dapat menggali demokrasi bahkan dalam skala terkecil.

### **3. Peran Guru Pendidikan Kewarganegaraan dalam meningkatkan partisipasi politik di sekolah**

Partisipasi politik tidak hanya menunjukkan praktik pemilihan pejabat publik, tetapi juga kegiatan yang mencerminkan demokrasi dan pengambilan keputusan yang partisipatif, termasuk partisipasi politik (Efendi, 2020). Di lingkungan sekolah, partisipasi politik dapat dilakukan dengan memilih guru bentukan dan memilih ketua kelompok belajar. Hal ini dapat diartikan bahwa partisipasi politik ini merupakan kegiatan elektoral dimana pelajar memberikan suara untuk menentukan siapa yang akan menjadi pemimpinnya. Untuk terlibat dalam partisipasi politik, sekolah harus mampu memberikan pemahaman yang baik kepada pelajar tentang berbagai proses aktivitas politik di Indonesia dan perannya sebagai warga negara yang memenuhi hak dan kewajibannya dalam partisipasi politik (Efendi, 2020).

Dalam hal ini pelatihan pendidikan kewarganegaraan memegang peranan penting, karena materi yang terkandung di dalamnya mengajarkan bagaimana menjadi peserta politik yang baik dan benar dan tentunya tidak ada yang memaksanya, karena seseorang harus menjadi peserta politik dengan kesadarannya sendiri. Partisipasi politik

di sekolah juga dapat dilakukan melalui organisasi seperti OSIS, misalnya dengan menyelesaikan latihan dasar kepemimpinan sekolah (LDKS), mengikuti pemilihan ketua OSIS, dan membentuk pengurus OSIS (Haerul, 2019).

Kegiatan yang diikuti selama ini di OSIS adalah pelajar dapat berdemokrasi di lingkungan sekolah terlebih dahulu, sehingga nantinya memiliki gambaran tentang partisipasi politik yang didukung negara. Selain OSIS, partisipasi politik juga dapat dilakukan melalui kegiatan Kepramukaan seperti mengikuti workshop atau pelatihan kepemimpinan Pramuka, kursus kepemimpinan Pramuka, mengikuti pembinaan Pembina Pramuka dan kegiatan Pramuka lainnya (Haerul, 2019). Manfaat mengikuti kegiatan Pramuka bagi pelajar adalah mengasah jiwa kepemimpinan dalam berbagai kegiatan yang diadakan di dalamnya, sehingga diharapkan nantinya pelajar dapat menjadi pemimpin yang baik bagi masyarakat atau anggotanya di kemudian hari.

Peran Guru dalam memberikan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat dilihat dari setiap kegiatan pembelajaran yang terjadi di dalam kelas. Salah satu kegiatan pembelajaran yang dapat terlihat ialah pada kegiatan inti dimana Guru menjadi fasilitator dalam menyampaikan materi terkait partisipasi politik bagi peserta didik. Pembelajaran dapat dilakukan dengan memberikan stimulus atau dorongan kepada peserta didik untuk bisa melihat apa yang dimaksud dengan partisipasi politik dan bagaimana contoh yang dapat diterapkan baik dari lingkungan terkecil sampai kepada peran serta bagi bangsa dan negara. Salah satu contoh konkret yang hendak dicapai oleh peserta didik adalah bagaimana memberikan partisipasi politik yang baik dan bertanggung jawab sehingga tidak mudah diintervensi oleh pihak manapun. Tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan dalam indikator partisipasi politik adalah mempersiapkan peserta didik agar dapat memberikan suara dalam pemilihan umum bagi pemilih pemula yang dinyatakan sudah cukup untuk memilih yang ditandai dengan Kartu Tanda Penduduk.

Partisipasi politik pelajar di sekolah tidak terlepas dari peran Pendidikan Kewarganegaraan. Pada mata pelajaran Hukum Perdata, pelajar diberikan materi yang menjelaskan tentang demokrasi dan politik. Materi demokrasi menjelaskan bahwa rakyat berhak menjalankan segala kegiatan politik tanpa ada paksaan dari pihak manapun, karena pada dasarnya kekuasaan ada di tangan rakyat.

Materi Pendidikan Kewarganegaraan juga menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak memilih dan berpendapat, bahwa jika dikaitkan dengan kegiatan politik pelajar di sekolah, pelajar berhak memilih dalam pemilihan ketua kelas dan ketua OSIS. dilakukan dan tidak membiarkan pelajar acuh tak acuh terhadap kegiatan politik di sekolah. Juga sesuai dengan tujuan masyarakat madani, warga negara yang baik harus berpartisipasi dalam berbagai jenis kegiatan politik, baik di masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Di setiap sekolah, tentunya terdapat berbagai macam organisasi. Kegiatan berorganisasi di sekolah merupakan sarana untuk menjamin partisipasi pelajar dalam politik dan tempat bagi pelajar untuk berlatih sebelum memasuki tingkat politik di masyarakat di masa depan.

Pendidikan kewarganegaraan bertujuan agar siswa dapat berfikir secara kritis, kreatif cerdas dan bertanggung jawab, sehingga Pendidikan kewarganegaraan tidak hanya mengedepankan kemampuan intelektual saja namun juga mengedepankan moralitas peserta didik. Hal itu berbeda dengan Pendidikan kewarganegaraan yang berkembang dalam paradigma lama, bahwa Pendidikan moral dalam pembelajaran Pendidikan kewarganegaraan merupakan indoktrinasi nilai-nilai moral.

Pendidikan Kewarganegaraan mengajarkan bagaimana menciptakan kerukunan di lingkungan sekolah. Sejalan dengan tujuan Pendidikan kewarganegaraan yaitu untuk

mengetahui dan memahami isi dan makna yang terkandung didalam Pancasila dan UUD 1945 atau dengan kata lain untuk menjadi warga negara yang baik berdasarkan falsafah negara dan Undang-Undang Dasar 1945 dan dengan demikian Pendidikan kewarganegaraan adalah salah satu upaya Pendidikan yang menyangkut pembentukan dan perkembangan pribadi dan anak didik atau dengan kata lain dengan merupakan salah satu cara untuk membentuk watak bangsa Indonesia serta membentuk kepribadian manusia Indonesia yang seutuhnya sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dan UUD 1945 PKN sebagai Pendidikan demokrasi merupakan mata pelajaran yang bersifat multidimensional. Ia merupakan Pendidikan nilai normal, Pendidikan social dan Pendidikan politik. Namun yang paling menonjol adalah sebagai Pendidikan nilai dan Pendidikan moral. Oleh karena itu secara singkat Pendidikan Kewarganegaraan dinilai sebagai mata pelajaran yang mengusung misi Pendidikan nilai dan moral.

## **KESIMPULAN**

Pendidikan Kewarganegaraan bukanlah semata-mata pelajaran yang biasa saja, karena melalui Pendidikan Kewarganegaraan dapat menciptakan generasi penerus yang cinta terhadap tanah air dan membentuk karakter manusia yang sesuai dengan identitas bangsa. Pendidikan kewarganegaraan bertujuan tidak hanya untuk mendorong partisipasi warga negara, tetapi juga untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab, serta kemampuan untuk melakukan tindakan yang terarah dan efektif. Sebagai saran, mungkin kedepannya mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dapat dipehatikan lagi supaya proses pembelajaran bisa berjalan efektif dan efisien, dan bisa menciptakan warga masyarakat yang mencintai Tanah Air dan dapat berperan untuk membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## **REFERENSI**

- Berlian, R. K., & Dewi, D. A. (2021). Urgensi Pendidikan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Negara Demokratis Dan Mewujudkan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 9(2), 486-498. <http://dx.doi.org/10.23887/jpku.v9i2.34151>
- Efendi, I. (2020). Pendidikan Kewarganegaraan: Wahana Pengembangan Kompetensi Warganegara Dalam Pengenalan Partisipasi Politik Pelajar Sekolah Dasar. *DIDAKTIKA TAUHIDI: Jurnal Pendidikan Guru Sekolah Dasar*, 7(2), 149-162. <https://doi.org/10.30997/dt.v7i2.2635>
- Haerul, I. (2019). Peranan Pendidikan Politik Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Pelajar Kelas X di MA AL-Muthmainnah. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*, 9(1). <https://jurnal.unsur.ac.id/jpphk/article/view/>
- Hamisa, W., & Murdiyono, M. (2018). Peran PKn sebagai pendidikan politik dalam membangun sikap demokratis dan partisipasi pelajar dalam organisasi di SMA. *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 5(2), 192-201. <https://doi.org/10.21831/hsjpi.v5i2.11205>
- Ivanna, J., Pardede, A. J., & Iqbal, M. (2018). Peran Media Cetak dalam Meningkatkan Partisipasi Politik di Kelurahan Bandar Selamat Kecamatan Medan Tembung Kota Medan. *Sciences (JEHSS)*, 1(1), 25-35.
- Mukhtarom, A., Arwen, D., & Kurniyati, E. (2019).

- Urgensi civic education dalam kehidupan bernegara. *Jurnal Kajian Islam dan Pendidikan Tadarus Tarbawy*, 1(2). <http://dx.doi.org/10.31000/jkip.v1i2.2050>
- Mutmainah, D., & Kamaluddin, K. (2018). Peran Guru Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Dalam Membentuk Sikap Dan Kepribadian Siswa. *CIVICUS: Pendidikan-Penelitian-Pengabdian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 6(2), 45-54.
- Nanggala, A., & Suryadi, K. (2020). Analisis Konsep Kampus Merdeka dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan*, 10-23. <https://doi.org/10.33061/jgz.v9i2.4545>
- Pahlevi, F. S. (2017). Eksistensi Pendidikan Kewarganegaraan di perguruan tinggi dalam memperkuat karakter bangsa Indonesia. *Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains*. <https://doi.org/10.21154/ibriez.v2i1.26>
- Pangalila, T. (2017). Peningkatan civic disposition pelajar melalui pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn). <https://repository.unima.ac.id>
- Rahman, A. (2018). Konsep Dasar Pendidikan Politik bagi Pemilih Pemula melalui Pendidikan Kewarganegaraan. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 44-51. <https://jurnal.unimed.ac.id>
- Rahman, A., & Suharno, S. (2020). Pelaksanaan Pendidikan Politik Melalui Pembelajaran Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan Untuk Meningkatkan Kesadaran Politik Pelajar. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 4(2), 282-290. <http://dx.doi.org/10.17977/um019v4i2p282-290>
- Rahman, I. N. (2016). Pengaruh civic literacy dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan terhadap partisipasi politik pelajar. *Untirta Civic Education Journal*, 1(1). <http://dx.doi.org/10.30870/ucej.v1i1.1884>
- Wijaya, K. A., Mulyadi, Y., & Suhendar, I. F. (2020). Peranan Pendidikan Politik dalam Mata Pelajaran PPKN terhadap Tingkat Partisipasi Politik Pelajar di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 CIANJUR. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*, 10(2). <https://jurnal.unsur.ac.id>
- Yahzinka, E. M. (2019). Pengembangan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Pendidikan Politik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 3(2), 87-91. <https://journal.upy.ac.id>

---

**Copyright Holder :**

© Alfian Zenuis Dakhi (2023).

**First Publication Right :**

© Attractive : Innovative Education Journal

**This article is under:**

